

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

“Teori sinyal merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku antara dua pihak ketika mereka mengakses informasi yang berbeda. Teori sinyal menjelaskan mengenai tindakan yang diambil oleh pemberi sinyal untuk memengaruhi perilaku penerima sinyal. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor)” (Ghozali, 2020). “Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan” (Supartini *et al.*, 2021). “Salah satu sinyal yang diberikan tertuang dalam laporan keuangan. Informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut diharapkan dapat membantu investor atau pihak eksternal untuk memberikan penilaian terhadap perusahaan. Artinya, sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi (*information content*) untuk dapat mengubah penilaian pihak eksternal perusahaan” (Ghozali, 2020). Menurut Godfrey *et al.* (2010),

*“signalling theory, whereby managers use the accounts to signal expectations and intentions regarding the future. According to signalling theory, if managers expected a high level of future growth by the firm, they would try to signal that to investors via the accounts”.*

Diartikan bahwa “teori sinyal menjelaskan bahwa manajer menggunakan akun-akun dalam laporan keuangan untuk memberi sinyal mengenai masa depan. Ketika manajer mengharapkan adanya tingkat pertumbuhan di masa depan, manajer akan memberi sinyal tersebut kepada investor”. “Teori sinyal mengungkapkan bahwa pihak *internal* perusahaan memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan jika dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan. Kondisi dimana satu pihak memiliki kelebihan informasi sementara pihak lain tidak dalam teori keuangan disebut dengan ketimpangan informasi (*information asymmetry*)” (Ghozali, 2020). “Untuk menghindari asimetri informasi, perusahaan harus memberikan informasi sebagai sinyal kepada investor. Asimetri informasi perlu diminimalkan, sehingga

perusahaan *go public* dapat menginformasikan keadaan perusahaan secara transparan kepada investor” (Mukhtar *et al.*, 2019).

“Dalam teori sinyal menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan” (Dewi *et al.*, 2021). “Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori sinyal merupakan teori yang menyatakan perilaku manajer dalam mengkomunikasikan informasi tentang kondisi perusahaan melalui sinyal dan berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan, dimana perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kabar baik (*good news*). Perusahaan yang memiliki kabar baik cenderung ingin segera menyampaikan kabar baik tersebut kepada publik sehingga harga saham diharapkan meningkat. Sebaliknya, perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut cenderung menutupi kabar buruk (*bad news*) kepada publik” (Kasin & Arfianti, 2018).

“Teori sinyal merupakan teori yang apabila perusahaan menyediakan laporan keuangannya tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki informasi dan prospek yang baik di masa kini serta di masa yang akan datang dan hal ini merupakan kabar baik” (Septiani & Arfianti, 2022). “Kualitas laporan keuangan yang baik cenderung akan tepat waktu dalam pelaporan keuangan, dan hal tersebut merupakan sinyal positif yang dapat memengaruhi opini investor dan kreditur atau pihak-pihak lain yang berkepentingan” (Supartini *et al.*, 2021). Menurut Dewi *et al.* (2021), “penyampaian laporan keuangan berkaitan dengan teori sinyal karena terdapat asimetri informasi antara manager dan pemegang saham mengenai prospek perusahaan di masa mendatang sehingga untuk meminimalkan hal tersebut perusahaan mengeluarkan sinyal-sinyal melalui penyampaian laporan keuangan”.

## 2.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

“Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan kontrak antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan pihak manajemen (agen), dimana pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk menyejahterakan *principal* dalam jangka pendek maupun jangka panjang” (Godfrey *et al.*, 2010). “Pihak *principal* dalam penelitian ini bisa dikatakan sebagai investor sedangkan pihak agen adalah manajer. Ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan suatu wewenang pengambilan keputusan kepada agen akan muncul adanya hubungan agensi” (Dewi *et al.*, 2021). “Prinsipal mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang ekonomi rasional (*rational economic man*) yang hanya dimotivasi oleh kepentingan pribadi, tetapi mungkin mereka berbeda sehubungan dengan preferensi, kepercayaan dan informasi. Teori keagenan menyatakan bahwa agen akan berperilaku mementingkan dirinya (*self-interest*) yang mungkin akan bertentangan dengan kepentingan *principal*. Oleh sebab itu prinsipal akan membuat struktur mekanisme mengawasi agen agar mengikuti kehendak prinsipal.” (Ghozali, 2020).

Menurut Diliasmara & Nadirsyah (2019), “agen yang secara langsung berhubungan dengan proses perusahaan mendapatkan informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal, hal ini dikarenakan prinsipal tidak mengetahui informasi tentang kinerja perusahaan secara langsung melainkan melalui agen”. Godfrey *et al.* (2010) menyatakan “hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*), adanya pemisahan tugas antara pemilik dan manajemen. Hubungan keagenan dapat mengakibatkan terjadinya asimetri informasi (*information asymmetry*), manajer secara umum memiliki banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dari pemilik. Adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan agen menyebabkan timbulnya dua permasalahan, yaitu”:

- 1) “*Moral Hazard*; permasalahan yang muncul apabila agen tidak melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama dengan kontrak kerja”
- 2) “*Adverse Selection*; suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi karena adanya sebuah kelalaian dalam tugas yang dilakukan oleh agen”

“Untuk memperkecil asimetri informasi, maka pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku” (Diliasmara & Nadirsyah, 2019). “Ketepatanwaktuan penyampaian pelaporan keuangan ke publik akan mengurangi kecurangan pihak agen sebagai pihak yang memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak prinsipal untuk memanipulasi data. Auditor merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal dan pihak agen dalam mengelola keuangan perusahaan. Auditor akan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pihak agen terhadap pihak prinsipal dengan memberikan penilaian independen dan opininya atas laporan keuangan perusahaan dan keberlangsungan usaha entitas bisnis tersebut” (Sastrawan dan Badera, 2018). “Agen berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada prinsipal yang dimana bentuk informasi yang diberikan adalah pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan” (Dewi *et al.*, 2021).

### **2.3 Laporan Keuangan**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2021) “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”. “Laporan keuangan adalah sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan” (Kieso *et al.*, 2018). Dalam PSAK 1, “laporan keuangan yang lengkap terdiri dari (IAI, 2021):

- (a) “laporan posisi keuangan pada akhir periode”
- (b) “laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”
- (c) “laporan perubahan ekuitas selama periode”
- (d) “laporan arus kas selama periode”
- (e) “catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain”
  - (ea) informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya”
- (f) “laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya”.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Umum, mengenai Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2021), “laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, serta kreditor lainnya untuk membuat keputusan mengenai entitas pelapor berdasarkan informasi dalam laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu karakteristik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif peningkat. Karakteristik kualitatif fundamental terdiri dari”:

1) “Relevansi”

“Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai input yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (*outcomes*) masa depan. Informasi keuangan memiliki nilai konfirmatori jika dapat mengkonfirmasi atau mengubah evaluasi sebelumnya. Informasi adalah material jika salah

saji informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan. Materialitas adalah aspek relevansi yang spesifik untuk suatu entitas tertentu berdasarkan sifat atau besarnya”.

2) “Representasi Tepat”

“Informasi keuangan harus merepresentasikan secara tepat substansi dari fenomena yang akan direpresentasikan. Agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, tiga karakteristik harus dimiliki yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Karakteristik lengkap mencakup seluruh informasi yang diperlukan pengguna agar dapat memahami fenomena yang digambarkan, termasuk seluruh deskripsi dan penjelasan yang diperlukan. Karakteristik netral adalah tanpa bias dalam pemilihan atau penyajian informasi keuangan. Penjabaran netral tidak diarahkan, dibobotkan, ditekankan, dibatalkan penekanannya, atau dengan kata lain dimanipulasi untuk meningkatkan kemungkinan bahwa informasi keuangan akan diterima lebih baik atau tidak baik oleh pengguna. Karakteristik terakhir yaitu bebas dari kesalahan yang berarti tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan fenomena, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang dilaporkan telah dipilih dan diterapkan tanpa ada kesalahan dalam prosesnya”.

“Karakteristik kualitatif yang kedua yaitu karakteristik kualitatif peningkat, terdiri dari”:

1) “Keterbandingan”

“Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam, dan perbedaan antara, pos-pos. Berbeda dengan karakteristik kualitatif lainnya, keterbandingan tidak berhubungan dengan satu pos. Sebuah perbandingan mensyaratkan paling tidak dua pos”.

2) “Keterverifikasian”

“Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomik secara tepat sebagaimana mestinya. Keterverifikasian berarti bahwa berbagai pengobservasi independen dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai consensus, meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan, bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat”.

3) “Ketepatanwaktuan”

“Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat memengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut”.

4) “Keterpahaman”

“Pengklasifikasian, pengkarakteristikan dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dapat membuat informasi tersebut terpaham. Laporan keuangan disusun untuk pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomik serta pengguna yang meninjau dan menganalisis informasi dengan tekun”.

Dalam penyusunan laporan keuangan, terdapat beberapa tahapan dalam siklus akuntansi. Menurut Weygandt (2019), “siklus akuntansi terdiri dari 9 tahap, yaitu:”

1. “Menganalisis Transaksi Bisnis (*Analyze Business Transactions*)”

“Transaksi bisnis merupakan peristiwa ekonomi bisnis yang dicatat oleh akuntan. Transaksi bisnis bersifat eksternal dan *internal*. Transaksi bisnis eksternal lebih melibatkan peristiwa ekonomi antara perusahaan dan beberapa perusahaan luar seperti pembelian bahan baku, pembayaran sewa, dan penjualan barang dan jasa. Sedangkan, transaksi bisnis *internal* merupakan peristiwa yang terjadi akibat kegiatan ekonomi dalam suatu perusahaan seperti pembayaran gaji kepada karyawan”.

2. “Membuat Jurnal Transaksi (*Journalize the Transactions*)”

“Jurnal merupakan sebuah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. Jurnal dibagi dalam dua jenis, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan untuk semua bentuk bukti transaksi keuangan yang timbul akibat terjadinya transaksi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Sedangkan, jurnal khusus (*special journal*) merupakan jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan yang dikelompokkan sesuai dengan bentuk transaksi. Fungsi jurnal khusus adalah untuk mencatat transaksi-transaksi khusus yang terjadi pada perusahaan. Transaksi khusus yang dimaksud adalah transaksi yang banyak dan sering terjadi serta bersifat sama dan berulang. Jurnal khusus memiliki manfaat dan keunggulan seperti, kemudahan pencatatan secara sistematis, mempercepat proses data transaksi, mempermudah proses posting ke buku besar dan memudahkan pemeriksaan secara berkala”.

3. “Melakukan Posting ke Buku Besar (*Post to Ledger Account*)”

“Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah mengelompokkan setiap transaksi yang terjadi berdasarkan kelompok akunnya ke dalam buku besar (*general ledger*). Posting adalah mentransfer jurnal yang telah dibuat ke dalam akun buku besar. Sedangkan, buku besar adalah seluruh kelompok akun yang dikelola perusahaan”.

4. “Mempersiapkan Neraca Saldo (*Prepare a Trial Balance*)”

“Neraca saldo berisikan akun-akun dan saldo dari setiap akun pada periode tertentu. Biasanya perusahaan membuat neraca saldo pada akhir periode pembukuan. Neraca saldo untuk memeriksa apakah ada kesalahan dalam melakukan penjurnalan dan posting yang sebelumnya sudah dilakukan”.

5. “Membuat Jurnal Penyesuaian (*Journalize and Post Adjusting Entries*)”

“Jurnal penyesuaian adalah akun yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa perusahaan mengikuti prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Agar pendapatan dapat dicatat dalam periode yang sama saat dilakukan dan beban dapat diakui pada saat beban tersebut benar-



benar terjadi, perusahaan perlu melakukan penyesuaian terhadap neraca saldo agar informasi yang terkandung dalam neraca saldo benar”.

6. “Mempersiapkan Neraca Saldo yang Telah Disesuaikan (*Prepare an Adjusted Trial Balance*)”

“Neraca saldo yang telah disesuaikan menunjukkan saldo semua akun, termasuk juga yang sudah disesuaikan pada akhir periode. Tujuannya adalah untuk membuktikan persamaan atas total saldo debit dan total saldo kredit di dalam buku besar setelah dilakukannya penyesuaian”.

7. “Mempersiapkan Laporan Keuangan (*Prepare Financial Statements*)”

“Perusahaan dapat mempersiapkan laporan keuangan dari data yang terdapat di neraca saldo yang telah disesuaikan”.

8. “Membuat Jurnal Penutup (*Journalize and Post Closing Entries*)”

“Pada saat akhir periode akuntansi, perusahaan akan membuat jurnal penutup. Pada saat tutup buku, perusahaan akan memisahkan antara akun permanen dan akun sementara. Akun permanen diberikan kepada akun-akun yang digunakan di periode yang akan mendatang dan biasanya akun tersebut dapat di dalam *Statement of Financial Position* termasuk ekuitas. Contoh akun permanen yaitu persediaan, tanah, kendaraan, liabilitas, dan ekuitas. Sementara itu, akun sementara adalah akun yang berlaku pada periode itu saja dan terdiri dari semua akun *income statement* dan dividen seperti akun pendapatan, akun beban, dan dividen. Tujuan dibuat jurnal penutup adalah untuk menutup saldo akun-akun sementara yang memengaruhi penentuan saldo laba bersih yang akan ditutup ke dalam *income summary* agar dapat menyiapkan akun-akun yang tersedia untuk laporan di periode berikutnya. Proses menutup saldo akun sementara dilakukan dengan cara memindahkan seluruh saldo kolom debit ke kredit, dan seluruh saldo kolom kredit dipindahkan ke saldo kolom debit”.

9. “Mempersiapkan Neraca Saldo Setelah Penutupan (*Prepare a Post Closing Trial Balance*)”

“Neraca saldo setelah penutup adalah daftar dari akun permanen dan saldonya setelah perusahaan membuat dan melakukan posting jurnal

penutup. Tujuannya adalah untuk membuktikan persamaan dari saldo akun permanen yang akan dilanjutkan ke periode berikutnya”.

Laporan keuangan digunakan untuk menginformasikan mengenai keuangan suatu perusahaan kepada penggunanya. Menurut Weygandt, *et al.* (2019), “pengguna laporan keuangan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pengguna *internal* dan pengguna eksternal, yang dapat dijelaskan sebagai berikut”:

1) “Pengguna *Internal (Internal Users)*”

“Pengguna laporan keuangan *internal* adalah manajer yang merencanakan, mengatur dan menjalankan bisnisnya. Manajer meliputi manajer pemasaran (*marketing manager*), supervisor produksi (*production supervisor*), direktur keuangan (*finance director*), dan pegawai perusahaan (*company officers*)”.

2) “Pengguna Eksternal (*External Users*)”

“Pengguna eksternal adalah individu dan organisasi di luar perusahaan yang ingin mengetahui tentang informasi keuangan suatu perusahaan. Contoh pengguna eksternal adalah sebagai berikut”:

(a) “Investor (*owners*) yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk membuat keputusan membeli, menahan, atau menjual kepemilikan saham dari perusahaan”.

(b) “Kreditur (*bank atau suppliers*) yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengevaluasi resiko dalam memberikan kredit atau pinjaman uang”.

(c) “Otoritas pajak yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengevaluasi serta menentukan kebijakan pajak”.

(d) “Agensi regulasi yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengetahui apakah kegiatan operasional perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

“Informasi yang tersaji pada laporan keuangan lebih dapat diandalkan jika sudah melalui proses audit” (Halim, 2021). “Laporan keuangan yang merupakan

tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh KAP yang merupakan pihak ketiga yang independen karena” (Agoes, 2017):

- 1) “Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, jika laporan keuangan telah diaudit, maka dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan”.
- 2) “Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS)”.
- 3) “Mulai tahun 2001 perusahaan yang total asetnya Rp25 milyar ke atas harus memasukkan *audited financial statement* nya ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian”.
- 4) “Perusahaan yang sudah *go public* harus memasukkan *audited financial statement* nya ke Bapepam-LK paling lambat 90 hari setelah tahun buku”.
- 5) “SPT yang didukung *audited financial statement* lebih dipercaya oleh pihak pajak dibandingkan dengan yang didukung oleh laporan keuangan yang belum diaudit”.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, pada bagian Media dan Bahasa Pengumuman, tertulis bahwa:

- 1) “Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek”.
- 2) “Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tidak tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan”.

- 3) “Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyediakan Laporan Keuangan Berkala di situs web Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai situs web Emiten atau Perusahaan Publik”.

#### **2.4 Auditing**

Agoes (2017) mendefinisikan *auditing* sebagai “suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. Menurut Arens *et al.* (2017), pengertian *auditing* adalah sebagai berikut:

*“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”*

Definisi menurut Arens *et al.* (2017) tersebut memiliki arti bahwa “audit merupakan proses akumulasi dan evaluasi bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”. Arens *et al.* (2017) menyatakan bahwa terdapat “3 (tiga) jenis audit yang dapat dilakukan oleh *Certified Public Accountant (CPA)* atau Akuntan Publik Tersertifikasi, yaitu”:

- 1) “Audit Operasional (*operational audit*)”

“Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari setiap bagian dari prosedur dan metode operasional organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk meningkatkan operasional”.

- 2) “Audit Ketaatan (*compliance audit*)”

“Audit ketaatan dilakukan untuk menentukan apakah klien mengikuti prosedur, peraturan, atau regulasi secara yang secara spesifik ditetapkan

oleh beberapa otoritas yang lebih tinggi. Hasil akhir audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan pengguna luar, karena manajemen merupakan kelompok utama yang berkepentingan dengan ketaatan terhadap prosedur dan regulasi yang ditentukan”.

3) “Audit Laporan Keuangan (*financial statement audit*)”

“Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah laporan berisi kesalahan material atau kesalahan penyajian”.

Menurut Arens *et al.* (2017), “tujuan audit dapat diklasifikasikan sebagai berikut”:

1) “Eksistensi (*Existence*)”

“Untuk memverifikasi bahwa seluruh aset dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau terjadi pada tanggal tertentu, sehingga transaksi yang tercatat harus benar-benar terjadi dan tidak fiktif.”

2) “Keterjadian (*Occurrence*)”

“Untuk memastikan bahwa transaksi dan peristiwa yang tercatat dalam laporan keuangan telah terjadi sesuai dengan kenyataan dan relevan dengan entitas tersebut selama periode akuntansi yang bersangkutan. Sebagai contoh, transaksi penjualan yang tercatat adalah hasil dari pertukaran barang atau jasa yang sesungguhnya terjadi.”

3) “Kelengkapan (*Completeness*)”

“Untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar dan telah dimasukkan ke dalam jurnal.”

4) “Penilaian (*Valuation*)”

“Untuk memverifikasi bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang umumnya berlaku telah diterapkan dengan tepat.”

5) “Keakuratan (*Accuracy*)”

“Untuk memastikan bahwa transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat dengan jumlah yang akurat, perhitungan yang benar, diklasifikasikan dengan tepat, dan dicatat dengan benar.”

6) “Klasifikasi (*Classification*)”

“Untuk memverifikasi bahwa transaksi yang tercatat dalam jurnal telah diklasifikasikan dengan tepat, dan jika berkaitan dengan saldo, angka-angka yang terdapat dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat.”

7) “Pisah Batas (*Cut-Off*)”

“Untuk memastikan bahwa transaksi yang berhubungan dengan tanggal neraca dicatat pada periode yang sesuai. Transaksi yang memiliki risiko salah saji adalah transaksi yang dicatat menjelang berakhirnya periode akuntansi.”

8) “Pengungkapan (*Disclosure*)”

“Untuk memastikan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang relevan telah disajikan dengan tepat dalam laporan keuangan dan dijelaskan secara wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut.”

Proses audit dilakukan dengan tujuan memverifikasi asersi yang diajukan oleh manajemen. Menurut SA 315, “Asersi yang digunakan auditor dalam mempertimbangkan jenis-jenis kesalahan penyajian potensial yang berbeda yang dapat terjadi digolongkan ke dalam tiga kategori dan dapat berbentuk sebagai berikut”:

1) “Asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit”:

a) “Keterjadian (*occurrence*): transaksi dan peristiwa yang telah terbukukan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas”.

b) “Kelengkapan (*completeness*): seluruh transaksi dan peristiwa yang seharusnya terbukukan telah dicatat”.

- c) “Keakurasian (*accuracy*): jumlah-jumlah dan data lainnya yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan telah dicatat dengan tepat”.
  - d) “Pisah batas (*cut-off*): transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam periode akuntansi yang tepat”.
  - e) “Klasifikasi (*classification*): transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam akun yang tepat”.
- 2) “Asersi tentang saldo akun pada akhir periode”:
- a) “Eksistensi (*existence*): aset, liabilitas, dan ekuitas ada”.
  - b) “Hak dan kewajiban (*rights and obligations*): entitas memiliki atau mengendalikan hak atas aset dan memiliki kewajiban atas liabilitas”.
  - c) “Kelengkapan (*completeness*): seluruh aset, liabilitas dan ekuitas yang seharusnya terbukukan telah dicatat”.
  - d) “Penilaian dan pengalokasian (*valuation and allocation*): aset, liabilitas dan ekuitas tercantum dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan penyesuaian penilaian atau pengalokasian yang terjadi dibukukan dengan tepat”.
- 3) “Asersi tentang penyajian dan pengungkapan”:
- a) “Keterjadian serta hak dan kewajiban (*occurrence and rights and obligations*): peristiwa, transaksi dan hal-hal lainnya yang diungkapkan, telah terjadi dan berkaitan dengan entitas”.
  - b) “Kelengkapan (*completeness*): seluruh pengungkapan yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan telah disajikan”.
  - c) “Klasifikasi dan keterpahaman (*classification and understandability*): informasi keuangan disajikan dan dijelaskan secara tepat, serta pengungkapan disajikan dengan jelas”.
  - d) “Keakurasian dan penilaian (*accuracy and valuation*): informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat”.

“Dalam pelaksanaan audit, auditor harus melakukan beberapa tahapan. Terdapat 4 tahapan proses audit, yaitu” (Arens *et al.*, 2017):

1) “Penerimaan Perikatan Audit”

“Perikatan adalah kesepakatan antara dua pihak untuk menjalankan suatu ikatan perjanjian. Tahap awal dalam melakukan audit atas laporan keuangan adalah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dengan calon klien, atau melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dengan klien yang sudah ada. Dalam perikatan perjanjian ini, klien menugaskan pekerjaan audit laporan keuangannya kepada auditor, dan auditor bersedia melaksanakan pekerjaan audit tersebut dengan mengandalkan kompetensinya yang profesional.”

Terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipertimbangkan oleh auditor saat memutuskan apakah akan menerima perikatan audit dari calon klien, yaitu:

a) “Mengevaluasi Integritas Manajemen”

“Agar dapat menerima perikatan audit, auditor memiliki kepentingan untuk menilai integritas manajemen, sehingga auditor dapat yakin bahwa manajemen perusahaan klien merupakan pihak yang dapat dipercaya, sehingga laporan keuangan yang diaudit dapat bebas dari salah saji.”

b) “Mengidentifikasi Kondisi Khusus dan Risiko yang Tidak Biasa”

Berdasarkan SA 210, “terdapat berbagai faktor yang harus dipertimbangkan oleh auditor terkait dengan kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa yang mungkin memengaruhi keputusan untuk menerima perikatan audit dari calon klien, dan hal ini dapat diidentifikasi dengan langkah-langkah berikut”:

(1) “Mengidentifikasi Pengguna Laporan Keuangan Auditor”

“Auditor harus mempertimbangkan apakah klien termasuk dalam kategori perusahaan publik atau privat, dan juga harus menilai pihak ketiga yang kemungkinan akan memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini karena tanggung jawab hukum auditor dapat bervariasi tergantung pada pengguna laporan keuangan.”



(2) “Memperkirakan Terdapat Persoalan Hukum dan Stabilitas Keuangan Klien”

“Auditor dapat mengalami kerugian finansial karena harus menanggung denda dari keputusan pengadilan dan menghadapi biaya pengacara jika perusahaan klien terlibat dalam sengketa hukum, dan jika penggugat dapat membuktikan bahwa mereka mengalami kerugian akibat keputusan yang mereka ambil berdasarkan laporan keuangan.”

(3) “Mengevaluasi Auditabilitas Perusahaan Klien”

“Auditor harus menilai faktor-faktor lain yang menimbulkan keraguan tentang kemungkinan melakukan audit terhadap klien. Beberapa contoh faktor tersebut yaitu perusahaan tidak memiliki catatan akuntansi, perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, atau adanya pembatasan yang ditetapkan oleh klien terkait dengan audit yang akan dilakukan.”

c) “Menilai Kompetensi untuk Melaksanakan Audit”

“Sebelum auditor menyetujui perikatan audit, perlu dipertimbangkan apakah auditor dan anggota tim audit memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelesaikan perikatan tersebut.”

d) “Mengevaluasi Independensi”

“Auditor harus memastikan bahwa setiap anggota tim audit adalah seorang profesional yang tidak terlibat dalam situasi atau memiliki faktor-faktor yang dapat meragukan independensi tim audit mereka.”

e) “Menentukan Kemampuan untuk Menggunakan Kemahiran Profesionalnya dengan Kecermatan dan Keseksamaan”

“Tingkat akurasi dan kecermatan dalam penerapan keahlian profesional auditor bergantung pada ketersediaan waktu yang cukup untuk merencanakan dan melaksanakan audit.” Secara

umum, saat mempertimbangkan penerimaan perikatan, auditor membuat perkiraan kebutuhan waktu audit dalam penjadwalan. Proses ini melibatkan estimasi jam kerja yang dibutuhkan oleh anggota tim audit berdasarkan tingkat hierarki (partner, manajer, senior, dll) untuk menyelesaikan setiap aspek audit dengan akurat. Estimasi waktu ini kemudian dikalikan dengan tarif per jam untuk setiap tingkat staf, serta ditambah dengan perkiraan biaya transportasi dan biaya lain yang diperlukan, sehingga dapat dihitung perkiraan biaya total untuk perikatan tersebut. Angka perkiraan biaya ini kemudian digunakan untuk menentukan honorarium audit. Setelah perikatan diterima, rincian anggaran waktu dan jadwal pekerjaan lapangan akan dikembangkan sebagai langkah tambahan dalam tahap perencanaan. Partner yang bertanggung jawab atas perikatan harus memberikan persetujuan terhadap anggaran waktu yang ditetapkan pada awal audit dan perubahan waktu yang mungkin diperlukan. Selama audit berlangsung, waktu yang sebenarnya digunakan untuk setiap aspek audit akan dibandingkan dengan anggaran waktu awal dengan tujuan mengawasi biaya audit secara keseluruhan.

f) “Membuat Surat Perikatan Audit”

“Surat perikatan audit yang disusun oleh auditor untuk klien berperan sebagai dokumen resmi yang mencatat serta mengkonfirmasi penerimaan auditor atas penunjukan dari klien.”

2) “Perencanaan Auditor”

“Tahap kedua adalah saat auditor menerima perikatan audit dari kliennya dan mulai menjalankan proses audit. Terdapat 7 (tujuh) langkah yang harus diikuti oleh auditor dalam perencanaan auditnya, yaitu”:

a) “Memahami Bisnis dan Industri Klien”

“Auditor harus mempunyai pemahaman yang menyeluruh mengenai bisnis klien dan lingkungan terkait.”

b) “Melaksanakan Prosedur Audit”

“Prosedur analitik melibatkan identifikasi perhitungan/perbandingan yang perlu diperiksa, analisis data, identifikasi perbedaan yang signifikan, penyelidikan perbedaan signifikan yang tak terduga, dan evaluasi dampak hasil dari prosedur analitik dalam perencanaan audit.”

c) “Mempertimbangkan Tingkat Materialitas Awal”

“Auditor harus mempertimbangkan dua tingkat materialitas awal, yaitu tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Tingkat materialitas pada tingkat laporan keuangan digunakan oleh auditor dalam konteks pendapat atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu, tingkat materialitas pada tingkat saldo akun juga penting karena auditor harus melakukan verifikasi atas saldo akun tersebut.”

d) “Memperhitungkan Resiko Bawaan”

“Sejumlah risiko yang perlu menjadi pertimbangan bagi auditor dalam setiap fase dari proses audit, mulai dari perencanaan audit, pemahaman dan pengujian pengendalian internal, penilaian risiko pengendalian, pelaksanaan pengujian, penetapan risiko deteksi, penyusunan laporan, hingga penilaian risiko audit.”

e) “Mempertimbangkan berbagai Faktor yang Berpengaruh terhadap Saldo Awal (jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama)”

“Auditor perlu memastikan bahwa saldo awal mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya dan bahwa kebijakan tersebut telah diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan untuk tahun berjalan.”

f) “Mengembangkan Strategi Audit Awal terhadap Asersi Signifikan”

“Auditor memiliki opsi untuk memilih strategi awal dalam perencanaan audit untuk asersi individual atau golongan transaksi. Terdapat dua strategi yaitu pendekatan substansial primer (*primary substantive approach*) dan pendekatan risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah (*lower assessed level of control risk approach*).”

g) “Memahami Pengendalian Intern Klien”

“Langkah pertama dalam memahami pengendalian intern klien adalah menganalisis elemen-elemen pengendalian yang ada, diikuti dengan menilai sejauh mana pengendalian tersebut efektif dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya.”

3) “Pelaksanaan Pengujian Audit”

“Terdapat 3 (tiga) pengujian dalam pelaksanaan audit oleh seorang auditor profesional, yaitu”:

a) “Pengujian Analitik”

“Pada tahap awal audit, auditor melakukan pengujian analitik dengan menganalisis perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan yang lain. Pengujian analitik bertujuan untuk mendukung auditor dalam memahami klien dan mengidentifikasi area yang memerlukan audit lebih detail. Sebelum melakukan audit mendalam pada elemen-elemen tertentu, auditor harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang perusahaan yang sedang diaudit.”

b) “Pengujian Pengendalian”

“Seorang auditor profesional memerlukan informasi mengenai sejauh mana aktivitas pengendalian yang telah diatur dijalankan, kualitas pelaksanaan aktivitas pengendalian tersebut, dan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Informasi ini diperlukan untuk melakukan pengujian yang bertujuan memverifikasi sejauh mana efektivitas pengendalian internal klien.”

c) “Pengujian Substantif”

“Pengujian substantif adalah prosedur audit yang disusun untuk mengidentifikasi potensial kesalahan finansial yang dapat secara langsung memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Proses pengujian substantif mencakup”:

- (1) “Verifikasi atas ketepatan saldo kas”
- (2) “Penetapan prosedur analitis”
- (3) “Perhitungan kas yang disimpan dalam entitas”

- (4) “Melaksanakan pengujian pisah batas atas”
- (5) “Konfirmasi saldo simpanan pinjaman di bank”
- (6) “Konfirmasi perjanjian atau kontrak lain dengan bank”
- (7) “Melakukan pemindaian atau pembuatan rekonsiliasi bank”
- (8) “Menghimpun dan menggunakan laporan pisah batas bank”
- (9) “Melakukan pengujian pisah batas bank”
- (10) “Mengusut transfer bank”
- (11) “Menyiapkan pembuktian kas”
- (12) “Membandingkan penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum”.

4) “Pelaporan Audit”

“Laporan hasil audit adalah tahap penting dan merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan audit. Pelaporan audit berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban atas tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan kepada auditor. Secara umum, laporan auditor dapat dianggap sebagai sebuah laporan yang berisi pendapat independen dari auditor mengenai kecocokan atau keakuratan pernyataan klien bahwa laporan keuangan mereka telah disajikan dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya.”

Auditor harus memperoleh suatu pemahaman atas pengendalian *internal* yang relevan dengan audit. Berdasarkan SA 315 (IAP), “pengendalian *internal* merupakan proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap Perundang-undangan”. “Pengendalian *internal* terdiri atas 5 (lima) komponen yaitu sebagai berikut” (Arens *et al.* 2017):

- 1) “Lingkungan pengendalian (*control environment*): yaitu lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang

mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur, dan pemilik entitas tentang pengendalian *internal* dan pentingnya pengendalian tersebut bagi entitas”. Menurut SA 315 (IAPI), lingkungan pengendalian meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

(a) “Integritas dan nilai etika”.

“Integritas dan perilaku etis merupakan produk standar etika dan perilaku entitas, bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan diperkuat dalam praktik. Sebagai contoh, tindakan manajemen untuk menghilangkan atau memitigasi insentif atau godaan yang dapat membuat personel untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, ilegal, atau tidak etis”.

(b) “Komitmen terhadap kompetensi”

“Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab individu”.

(c) “Partisipasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola”

“Kesadaran pengendalian suatu entitas dipengaruhi secara signifikan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola”.

(d) “Falsafah dan gaya operasi manajemen”

“Falsafah dan gaya operasi manajemen meliputi suatu rentang yang luas dari karakteristik. Sebagai contoh, sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan dapat dinyatakan dengan sendirinya melalui pemilihan yang bersifat konservatif atau agresif dari prinsip akuntansi alternatif yang tersedia, atau kecermatan dan konservatisme yang melandasi penyusunan estimasi akuntansi”.

(e) “Struktur organisasi”

“Penetapan suatu struktur organisasi yang relevan mencakup pertimbangan atas wilayah utama atas wewenang dan tanggung jawab serta garis pelaporan yang tepat. Ketepatan struktur organisasi suatu entitas tergantung dari ukuran dan sifat aktivitas entitas tersebut”.

(f) “Penugasan wewenang dan tanggung jawab”

“Penugasan wewenang dan tanggung jawab dapat mencakup kebijakan yang berkaitan dengan praktik bisnis yang tepat, pengetahuan dan pengalaman personel kunci, dan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas. Selain itu, penugasan tersebut juga mencakup kebijakan dan komunikasi yang diarahkan untuk menjamin bahwa seluruh personel memahami tujuan entitas, mengetahui bagaimana tindakan mereka secara individu saling terkait dan memberikan kontribusi terhadap tujuan tersebut, serta menetapkan bagaimana dan untuk apa mereka akan dimintakan pertanggungjawaban”.

(g) “Kebijakan dan praktik sumber daya manusia”

“Kebijakan dan praktik sumber daya manusia sering menunjukkan hal-hal penting dalam hubungannya dengan kesadaran pengendalian suatu entitas. Sebagai contoh, standar untuk perekrutan individu yang paling cakap (dengan penekanan pada latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sebelumnya, pencapaian masa lalu, serta bukti integritas dan perilaku etis) menunjukkan komitmen entitas terhadap orang-orang yang kompeten dan dapat dipercaya”.

- 2) “Penilaian risiko (*risk assessment*): yaitu penilaian risiko mencakup proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mencegah organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya”. Menurut SA 315 (IAP), “untuk tujuan pelaporan keuangan, proses penilaian risiko entitas mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko bisnis yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan entitas yang berlaku, mengestimasi signifikansi risiko bisnis tersebut, menilai kemungkinan keterjadiannya, dan memutuskan tindakan untuk merespons dan mengelola risiko tersebut beserta hasil proses penilaian risiko tersebut. Sebagai contoh, proses penilaian risiko entitas dapat diarahkan untuk melihat bagaimana entitas mempertimbangkan kemungkinan transaksi tidak tercatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi signifikan yang tercantum dalam laporan keuangan”.

Dalam SA 315 (IAP1) juga dijelaskan bahwa risiko dapat muncul atau berubah karena keadaan berikut:

- (a) “Perubahan dalam lingkungan operasi”  
“Perubahan peraturan atau lingkungan operasi dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan yang kompetitif dan dalam risiko yang berbeda secara signifikan”.
- (b) “Personel baru”  
“Personel baru dapat memiliki fokus atau pemahaman yang berbeda tentang pengendalian *internal*”.
- (c) “Sistem informasi yang baru atau yang ditingkatkan”  
“Perubahan yang signifikan dan pesat dalam sistem informasi dapat mengubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian *internal*”.
- (d) “Pertumbuhan yang pesat”  
“Ekspansi operasi yang signifikan dan pesat dapat melemahkan pengendalian dan meningkatkan risiko kerusakan dalam pengendalian”.
- (e) “Teknologi baru”  
“Penggunaan teknologi baru dalam proses produksi atau sistem informasi dapat mengubah risiko yang terkait dengan pengendalian *internal*”.
- (f) “Model, produk, atau aktivitas bisnis baru”  
“Ketika entitas memasuki area atau transaksi bisnis dengan pengalaman yang terbatas, risiko baru yang terkait dengan pengendalian *internal* dapat muncul”.
- (g) “Restrukturisasi korporasi”  
“Restrukturisasi dapat disertai dengan pengurangan karyawan dan perubahan dalam supervisi dan pemisahan tugas yang dapat mengubah risiko yang terkait dengan pengendalian *internal*”.
- (h) “Ekspansi entitas di luar negeri”  
“Ekspansi atau akuisisi entitas di luar negeri membawa risiko baru, dan sering kali, bersifat unik, yang dapat memengaruhi pengendalian



*internal*, sebagai contoh, risiko tambahan atau risiko yang berubah sebagai akibat dari transaksi mata uang asing”.

(i) “Standar akuntansi baru”

“Adopsi prinsip akuntansi baru atau perubahan prinsip akuntansi dapat memengaruhi risiko dalam penyusunan laporan keuangan”.

- 3) “Aktivitas pengendalian (*control activities*): yaitu kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas”. Berdasarkan SA 315 (IAP1), umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut”:

(a) “*Review* terhadap kinerja”

“Aktivitas pengendalian ini mencakup penelaahan dan analisis kinerja aktual dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, dan kinerja periode lalu; menghubungkan serangkaian data yang berbeda (data operasi atau data keuangan) satu sama lainnya, bersama dengan analisis hubungan dan tindakan investigatif dan korektif; membandingkan data *internal* dengan sumber informasi eksternal; serta menelaah kinerja fungsional atau kinerja aktivitas”.

(b) “Pengolahan informasi”

“Dua pengelompokan besar atas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah: (i) pengendalian aplikasi, pengendalian yang diterapkan atas pengolahan aplikasi individu, dan (ii) pengendalian teknologi informasi umum, yaitu pengendalian berupa kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan banyak aplikasi yang mendukung berfungsinya pengendalian aplikasi secara efektif dengan membantu untuk menjamin beroperasinya sistem informasi secara tepat dan berkelanjutan. Contoh-contoh pengendalian aplikasi mencakup pengecekan keakurasian perhitungan atas catatan, memelihara dan menelaah akun dan neraca saldo, pengendalian terotomatisasi seperti pengecekan edit atas data masukan dan pengecekan urutan numerik, dan

penindaklanjutan secara manual atas laporan penyimpangan. Contoh-contoh pengendalian teknologi informasi umum adalah pengendalian perubahan program, pengendalian atas implementasi paket aplikasi perangkat lunak baru, dan pengendalian atas perangkat lunak sistem yang membatasi akses terhadap atau yang memantau utilitas sistem yang dapat mengubah data atau catatan keuangan tanpa meninggalkan jejak audit”.

(c) “Pengendalian fisik”

“Pengendalian ini mencakup; (i) pengamanan yang memadai atas fisik aset, seperti fasilitas yang aman atas akses terhadap aset dan catatan, (ii) otorisasi atas akses terhadap program komputer dan file data, dan (iii) penghitungan dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali secara periodik (sebagai contoh: perbandingan antara hasil penghitungan kas, surat berharga, dan persediaan dengan catatan akuntansi)”.

(d) “Pemisahan tugas”

“Penugasan tanggung jawab kepada individu yang berbeda dalam pengotorisasian dan pencatatan transaksi, serta penyimpanan aset. Pemisahan tugas dimaksudkan untuk mengurangi peluang kemungkinan individu manapun untuk berada dalam suatu posisi yang memungkinkannya baik untuk melakukan maupun menyembunyikan kesalahan atau kecurangan dalam tugas normalnya”.

- 4) “Informasi dan komunikasi (*information and communication*): yaitu sistem informasi dan komunikasi adalah memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk menjaga akuntabilitas atas aset yang dicatat”.

Menurut Agoes (2017), “komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian *internal* terhadap pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahaminya”:

- (a) “Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan”.
  - (b) “Bagaimana transaksi tersebut dimulai”.
  - (c) “Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi”.
  - (d) “Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik (seperti komputer dan *electronic data interchange*) yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi”.
- 5) “Pemantauan (*monitoring*): yaitu kegiatan pemantauan berhubungan dengan penilaian berkelanjutan atau berkala atas kualitas pengendalian *internal* oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian sudah beroperasi dengan baik dan diubah sebagaimana mestinya”. Menurut Agoes (2017), “aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan pelanggan dan komentar dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan”.

Mengutip dari laman Kumparan.com (2021), “salah satu contoh pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan PT Indofood Sukses Makmur (INDF) yaitu sejak munculnya wabah corona, banyak kantor yang menerapkan skema bekerja dari rumah atau yang biasa disebut *work from home (WFH)*. Pada awal diterapkannya sistem *WFH* oleh INDF, hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan aktivitas karena keberlangsungan kerja yang tidak langsung diawasi oleh bagian-bagian terkait. Selain itu, terdapat dampak negatif berikutnya yaitu adanya sistem PHK secara paksa terhadap beberapa karyawan yang menyebabkan penggangguran sumber daya manusia (SDM) secara berlebihan. Hal tersebut menyebabkan perlu adanya audit manajemen SDM pada perusahaan baik karyawan internal maupun eksternal. Akan tetapi, di tengah pandemi corona menjadi hambatan bagi auditor dalam melakukan tugas pengawasan”.

“Oleh karena itu, INDF memiliki cara tersendiri agar auditor tetap dapat melaksanakan tugas yaitu dengan menggunakan teknologi informasi yang diterapkan dalam proses *auditing* atau lebih dikenal sebagai audit jarak jauh. Audit jarak jauh dapat menjadi solusi di tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk menjalankan audit fisik secara tatap muka. Para auditor mulai menerapkan pengawasan internal berbasis teknologi informasi pada beberapa lini pekerjaannya. Pekerjaan yang dimaksud seperti disposisi *online* auditor via intranet pegawai, penggunaan surat elektronik dalam bentuk *pdf*, dan juga termasuk dalam hal penggunaan tandatangan digital. Selama masa *WFH* auditor menggunakan aplikasi *zoom meeting* untuk rapat internal maupun eksternal. Pengumpulan bukti juga dilakukan dengan bantuan komputer”.

“Audit jarak jauh diberlakukan atas ketentuan dari pihak penyelenggara audit guna tetap mendukung proses pengauditan. Adanya penggunaan audit jarak jauh juga untuk mengikuti perkembangan dunia dengan memaksimalkan teknologi yang ada. Dari proses tersebut diharapkan dapat memenuhi kualitas dan kuantitas SDM yang diinginkan perusahaan, serta dapat terjadi peningkatan aktivitas operasional SDM pada PT Indofood Sukses Makmur pada masa pandemi”.

Menurut Agoes (2017), “hubungan pengendalian *internal* dengan ruang lingkup (*scope*) pemeriksaan yaitu jika pengendalian *internal* suatu perusahaan lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar, dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikannya. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian *internal* perusahaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian *internal* tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas *scope* pemeriksaannya pada waktu melakukan *substantive test*. Misalnya: pada saat mengirim konfirmasi piutang, jumlah konfirmasi yang dikirimkan harus lebih banyak dan pada saat melakukan observasi atas *stock opname*, tes atas perhitungan

persediaan harus lebih banyak. Sebaliknya jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian *internal* berjalan efektif, maka *scope* pemeriksaan pada waktu melakukan *substantive test* bisa dipersempit. *Substantive test* adalah *test* terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam *substantive test* antara lain”:

- 1) “Inventarisasi aset tetap”
- 2) “Observasi atas *stock opname*”
- 3) “Konfirmasi piutang, utang, dan bank”
- 4) “*Subsequent collection dan subsequent payment*”
- 5) “*Cash opname*”
- 6) “Pemeriksaan rekonsiliasi bank dan lain-lain”

“Jika pada melakukan *substantive test* auditor menemukan kesalahan-kesalahan, harus dipertimbangkan apakah kesalahan tersebut jumlahnya material atau tidak. Jika kesalahannya material, auditor harus mengusulkan *audit adjustment* secara tertulis. Jika usulan *adjustment* tidak disetujui klien, dan auditor yakin usulan *adjustment* tersebut benar, maka auditor tidak boleh memberikan *unqualified opinion*. Untuk kesalahan yang jumlahnya tidak material, auditor tetap perlu mengajukan usulan *adjustment*, tetapi tidak perlu dipaksakan karena tidak akan memengaruhi opini akuntan publik. Dalam melakukan *substantive test*, auditor perlu membuat kertas kerja dalam bentuk *Working Balance Sheet, Working Profit and Loss, Top Schedule* dan *Supporting Schedule*” (Agoes, 2017).

Menurut SA 200 (IAPI) “Bukti audit diperlukan untuk mendukung opini dan laporan auditor. Bukti audit bersifat kumulatif dan diperoleh dari prosedur audit yang dilaksanakan selama audit dan juga mencakup informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti audit periode lalu atau prosedur pengendalian mutu suatu KAP untuk penerimaan dan keberlanjutan klien”. “Bukti audit juga terbagi menjadi 8 kategori”, yaitu (Arens *et al.*, 2017):

- 1) “*Physical examination* (Pemeriksaan Fisik)”

“Pemeriksaan fisik merupakan perhitungan aset berwujud yang dilakukan oleh auditor. Pemeriksaan fisik bertujuan untuk menverifikasi keberadaan suatu aset serta kelengkapan pencatatan atas aset. Contoh pemeriksaan terkait persediaan fisik yang dimiliki perusahaan biasanya disebut *stock opname*, jika pemeriksaan terkait kas fisik yang dimiliki perusahaan biasanya disebut *cash opname*”.

2) “*Confirmation* (Konfirmasi)”

“Konfirmasi merupakan respon atau penjelasan tertulis dari pihak ketiga yang melakukan verifikasi atas akurasi berdasarkan informasi yang diajukan oleh auditor. Pada awalnya surat konfirmasi dibuat oleh klien, kemudian klien meminta pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor. Konfirmasi merupakan jenis bukti audit yang paling sering digunakan dan sangat berbobot karena konfirmasi berasal dari pihak ketiga dan bukan klien”.

Whittington & Pany (2016) menyatakan bahwa terdapat “2 jenis konfirmasi yaitu *positive confirmation request* dan *negative confirmation request*”. “*Positive confirmation request* adalah permintaan yang ditujukan kepada debitur yang meminta jawaban secara langsung dan akurat mengenai jumlah yang terdapat pada surat permintaan konfirmasi. Bentuk lain dari konfirmasi positif disebut juga sebagai *blank form confirmation* atau konfirmasi kosong yang dimana jumlahnya tidak dicantumkan atas permintaan, tetapi meminta debitur untuk mengisi saldo sesuai dengan surat permintaan konfirmasi tersebut”.

“Sedangkan *negative confirmation request* merupakan komunikasi yang ditujukan kepada perusahaan debitur untuk memberi tahu auditor jika saldo yang tertera pada surat konfirmasi tidak benar atau tidak tepat. Konfirmasi *negative* ini dapat dilakukan jika satu atau lebih situasi berikut terpenuhi, yaitu: terdapat salah saji material dan terdapat cukup bukti audit yang diperoleh dari efektivitas operasi, sejumlah besar saldo kecil yang bersifat homogen, tingkat pengecualian yang rendah diharapkan oleh

auditor, atau memiliki keyakinan bahwa penerima surat konfirmasi akan membalas konfirmasi tersebut”.

3) “*Inspection/Documentation* (Inspeksi/Dokumentasi)”

“Inspeksi merupakan pemeriksaan yang dilakukan auditor atas dokumen dan pencatatan setiap transaksi klien untuk memperkuat informasi yang ada dalam laporan keuangan. Klasifikasi dokumen terbagi menjadi 2 jenis, yaitu dokumen *internal* dan dokumen eksternal. Dokumen *internal* merupakan dokumen yang disiapkan dan digunakan dalam perusahaan klien dan tidak diberikan kepada pihak ketiga. Sedangkan dokumen eksternal merupakan dokumen yang diberikan oleh pihak luar yang melakukan transaksi dengan perusahaan klien. Dokumen ini umumnya dipegang oleh klien dan mudah diakses”.

“Dalam melakukan inspeksi atau dokumentasi atas suatu transaksi, auditor seringkali melakukan *vouching*. *Vouching* merupakan penggunaan dokumentasi agar dapat mendukung transaksi atau jumlah yang tercatat. Arens *et al.* (2017) menyebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan *vouching*, auditor menverifikasi jurnal akuisisi dengan memeriksa *invoice* atau tanda terima dari vendor dan kemudian memenuhi poin keberadaan/*occurrence*”.

4) “Prosedur Analitis (*Analytical Procedures*)”

“Prosedur analitis merupakan suatu prosedur dengan melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti mengenai asersi tertentu dan untuk menilai kesesuaiannya dengan ekspektasi dari auditor, yang berhubungan dengan saldo rekening atau jenis transaksinya”.

5) “Investigasi Klien (*Inquiry of The Client*)”

“Pengumpulan informasi dari klien dengan cara menanyakan beberapa hal terkait kepada klien yang bersangkutan dengan cara melakukan wawancara atau memberikan beberapa pertanyaan yang ingin diketahui oleh auditor terkait dengan proses audit”.

6) “Penghitungan Ulang (*Recalculation*)”

“Melakukan perhitungan kembali dari perhitungan matematika yang dibuat oleh klien. Perhitungan ulang termasuk pemeriksaan kembali dengan melakukan uji untuk menilai keakuratan dari setiap perhitungan yang dilakukan, seperti prosedur untuk memperluas perhitungan pada persediaan, memeriksa perhitungan beban depresiasi dan beban dibayar dimuka. Rekalkulasi juga mencakup kegiatan *footing*. *Footing* merupakan penjumlahan pada kolom angka untuk menunjukkan kesamaan total perhitungan dengan angka pada klien”.

7) “Pelaksanaan Ulang (*Reperformance*)”

“Pengujian secara independen yang dilakukan auditor atas prosedur akuntansi dan pengendalian yang dibuat klien dan telah ditetapkan dalam sistem pengendalian *internal* perusahaan”.

8) “Pengamatan (*Observation*)”

“Pengamatan dan penilaian secara langsung atas proses kegiatan ataupun prosedur yang dijalankan oleh klien terkait dengan kepentingan pemeriksaan saat melakukan proses audit”.

Menurut Arens *et al.* (2017), “auditor mempertimbangkan risiko dalam merencanakan prosedur untuk memperoleh bukti audit yaitu dengan menerapkan *audit risk model*”. “*Audit risk model* digunakan auditor untuk mengidentifikasi salah saji dalam laporan keuangan secara keseluruhan untuk saldo akun, kelas transaksi, dan pengungkapan dimana salah saji mungkin terjadi”. “*Audit risk model* membantu auditor dalam menentukan berapa banyak dan jenis bukti apa saja yang harus terakumulasi untuk setiap tujuan audit yang relevan. *Audit risk model* terdiri dari” (Arens *et al.*, 2017):

1. “*Planned Detection Risk*”

“*Planned detection* atau risiko deteksi yang direncanakan adalah risiko bahwa bukti audit untuk tujuan audit akan gagal untuk mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja atau *performance materiality*”. “Risiko deteksi yang direncanakan menentukan jumlah bukti substantif dimana



auditor berencana untuk mengakumulasi, berbanding terbalik dengan ukuran risiko deteksi yang direncanakan. Jika risiko deteksi yang direncanakan berkurang, maka auditor perlu mengumpulkan lebih banyak bukti audit. *Planned detection risk* tergantung pada tiga faktor lain dalam model yaitu *inherent risk*, *control risk*, dan *acceptable risk*. *Planned detection risk* akan berubah jika auditor mengubah salah satu faktor audit risk lainnya”.

2. “*Inherent Risk*”

“*Inherent risk* atau risiko bawaan merupakan penilaian auditor atas kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material, sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal klien. Jika auditor menyimpulkan bahwa ada kemungkinan salah saji yang tinggi, maka auditor akan menyimpulkan bahwa risiko bawaan nya tinggi”

“Sebagai contoh, perhitungan yang rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Uang tunai lebih mudah dicuri jika dibandingkan dengan persediaan batu bara” (Agoes, 2017).

3. “*Control Risk*”

“*Control Risk* atau risiko pengendalian mewakili penilaian auditor atas risiko bahwa salah saji material dapat terjadi dalam suatu asersi dan tidak dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien” Sebagai contoh, meskipun perusahaan sudah mempunyai *internal control* yaitu saat mengeluarkan barang dari gudang harus ada otorisasi dari manajer gudang, namun tetap ada kemungkinan barang yang dikeluarkan salah.

4. “*Acceptable Audit Risk*”

“*Acceptable audit risk* adalah ukuran seberapa auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan mungkin terdapat salah saji secara material setelah proses audit selesai dan opini tanpa modifikasi telah dikeluarkan”. “Ketika auditor memutuskan *acceptable audit risk* nya rendah, maka auditor ingin lebih yakin lagi bahwa laporan keuangan tidak salah saji secara material. Jika auditor memutuskan untuk merendahkan *acceptable audit risk*, maka *planned detection risk* akan berkurang dan bukti audit harus ditingkatkan”.

“Berdasarkan SA 700 dan 705 (IAPI), terdapat 2 (dua) jenis opini audit, yaitu:

1) “Opini Tanpa Modifikasian”

“Opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Untuk merumuskan opini tersebut, auditor harus menyimpulkan apakah auditor telah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan”.

2) “Opini Dengan Modifikasian”

“Pada SA 705, dijelaskan bahwa terdapat kondisi yang mengharuskan auditor untuk memodifikasi opini dalam laporan auditor, yaitu ketika”:

- a) “Menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material; atau”
- b) “Tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material”.

“Terdapat 3 (tiga) tipe modifikasi terhadap opini auditor, yaitu”:

(1) “Opini Wajar dengan Pengecualian”

“Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika”:

- (a) “Auditor, setelah menerima bukti audit yang cukup kuat dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau”
- (b) “Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup kuat dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak *pervasive*”.

(2) “Opini Tidak Wajar”

“Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan”.

(3) “Opini Tidak Memberikan Pendapat”

“Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup kuat dan tepat yang mendasari opini dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Selain itu, auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika, dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, auditor menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan”.

## **2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

“Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan suatu cara untuk mendukung relevansi suatu informasi, agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparans dan berkualitas” (McGee, 2009 dalam Rahma *et al.*, 2019). “Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diharapkan serta frekuensi penyampaian laporan informasi” (Mustika & Ferdila, 2021). “Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memadai harus memperhatikan ketepatwaktuan dalam publikasi laporan keuangan” (Dyer & McHugh, 1975 dalam Jayanti, 2018).

“Informasi laporan keuangan harus tersedia dalam waktu singkat. Jika tidak, maka akan kehilangan sebagian dari nilai ekonominya” (Al Daoud *et al.*, 2014 dalam (Tang & Elvi, 2021). “Informasi yang tepat waktu akan memengaruhi kemampuan manajemen dalam menanggapi setiap kejadian dan permasalahan” (Mustika & Ferdila, 2021). “Informasi yang dihasilkan laporan keuangan akan sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan apabila informasi tersebut disajikan secara tepat waktu dan akurat. Salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas pelaporan keuangan adalah ketepatan waktu, rentang waktu antara tanggal laporan perusahaan dan tanggal ketika informasi keuangan diumumkan ke publik berhubungan dengan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan” (Mc Gee, 2007 dalam Valentina & Gayatri, 2018).

“Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam memengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Hilmi dan Ali, 2008 dalam Diliasmara & Nadirsyah, 2019). Menurut Surachyati *et al.* (2019), “*timeliness can also affect the relevance of financial information presented so that it has benefits for users of information, while financial information is said to be irrelevant in the event of a delay in the submission of financial statements*”. Sehingga “ketepatan waktu dapat memengaruhi relevansi informasi keuangan yang disajikan sehingga memiliki manfaat bagi pengguna informasi, sedangkan informasi keuangan dikatakan tidak relevan apabila terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan”.

“Pelaporan keuangan perusahaan dianggap pemakai utama (investor dan kreditor) sebagai *good news* dan *bad news*. *Good news* memiliki arti bahwa informasi yang disajikan dianggap sebagai hal penting dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan kredit dan keputusan investasi. Adapun *bad news*

mempunyai pengertian bahwa informasi yang disajikan tidak dapat memenuhi informasi sehingga investor dan kreditor sebagai pengguna utama memandang bahwa laporan keuangan masih perlu diperbaiki. Investor sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan dari pihak luar memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui tingkat pengembalian atas investasi dan membantu untuk memutuskan tindakan mereka baik untuk membeli, menahan atau menjual saham - saham perusahaan” (Rafikaningsih *et al.*, 2020). Menurut Mustika & Ferdila (2021), “ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah suatu kondisi dimana laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh BAPEPAM atau OJK”.

“Batas penyampaian laporan keuangan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP346/BL/2011 lampiran peraturan nomor X.K.2 mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yaitu pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan” ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). “Namun, OJK dan BEI mengeluarkan ketentuan baru terkait antisipasi atas pandemi *Covid-19* pada bulan Maret 2020. Pada 18 Maret 2020, OJK mengeluarkan siaran Pers mengenai relaksasi waktu penyampaian laporan keuangan tahun 2019 ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) dan pada 20 Maret 2020, Bursa juga mengeluarkan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00027/BEI/03-2020 mengenai relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan 2019 ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Kedua ketentuan tersebut menyebutkan bahwa batas penyampaian laporan keuangan tahunan diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu yang sudah ditentukan, yang seharusnya paling lambat 31 Maret diubah menjadi paling lambat 31 Mei”.

Apabila peraturan atau ketentuan tersebut dilanggar oleh perusahaan publik, maka terdapat sanksi dan denda yang diatur berdasarkan Peraturan Nomor I-H ketentuan II.6 oleh Bursa Efek Indonesia. “Perusahaan yang melanggar Peraturan Nomor I-E ketentuan II.1.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan akan dikenakan sanksi sebagai berikut”:

- 1) “Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan”.
- 2) “Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan”.
- 3) “Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda”.
- 4) “Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda”.
- 5) “Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda”. ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diproksikan dengan variabel *dummy*, yaitu 1 untuk perusahaan yang tepat waktu dan 0 untuk perusahaan yang tidak tepat waktu.

## **2.6 Profitabilitas (*Return of Assets*)**

Menurut Weygandt *et al.*, (2019), “*profitability measure the income or operating success of a company for a given period of time*” yang berarti profitabilitas mengukur laba atau keberhasilan operasional dari suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Menurut Kieso *et al.* (2018), “*profitability ratios measures of the*

*degree of success or failure of a given company or division for a given period of time*". Sehingga rasio profitabilitas mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan yang diberikan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. "Rasio profitabilitas bermanfaat dalam menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalam perusahaan selama periode tertentu" (Lestiowati, 2018). Menurut Kasmir (2019), terdapat "tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu":

- 1) "Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu"
- 2) "Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang"
- 3) "Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu"
- 4) "Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri"
- 5) "Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri"
- 6) "Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri"
- 7) "Dan tujuan lainnya"

"Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan" (Dewi *et al.*, 2021). "Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai efektivitas suatu kegiatan usaha dalam mendapatkan laba pada tingkat aset, penjualan, maupun ekuitas" (Hanafi & Halim, 2016 dalam Carolina & Tobing, 2019). Menurut Kieso *et al.* (2018), "rasio profitabilitas dapat dihitung dengan rasio *profit margin on sales, return on assets, return on share capital ordinary, earnings per share, price earnings ratio, dan payout ratio*".

Pada penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)*. Weygandt *et al.*, (2019), menyatakan bahwa "*return on asset* adalah rasio untuk mengukur profitabilitas yang dihasilkan menggunakan aset perusahaan". Menurut

Zutter & Smart (2019), “*return on assets reveals management’s effectiveness in generating profits from the assets it has available, and it is perhaps the most important measure of return*”. Sehingga, “*ROA mengungkapkan keefektifan manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang tersedia, dan ini mungkin merupakan ukuran pengembalian yang paling penting*”. “*ROA diukur dengan membandingkan antara laba bersih dengan rata-rata total aset*” (Weygandt *et al.*, 2019)

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Total Assets}} \quad (2.1)$$

Keterangan:

*Net income* : Laba bersih tahun berjalan

*Average total asset* : Rata-rata dari total asset

Dan untuk menghitung *average total asset*, dapat dirumuskan sebagai berikut (Weygandt *et al.*, 2019):

$$\text{Average Total Assets} = \frac{\text{Asset}_{(t)} + \text{Asset}_{(t-1)}}{2} \quad (2.2)$$

Keterangan:

*Asset<sub>(t)</sub>* : Total aset pada tahun t

*Asset<sub>(t-1)</sub>* : Total aset 1 tahun sebelum tahun t

Menurut Sawir (2005:18) dalam Ramadani (2021), “*return on asset (ROA)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan, semakin besar nilai *ROA* maka semakin besar tingkat keuntungan perusahaan dalam penggunaan aset”. Menurut Lukviarman (2016:55) dalam Hamid (2021), “standar industri *return on asset* adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1 Standar Industri *Return on Asset*

Standar	Kriteria
>5,98%	Sangat Baik
4,00% - 5,98%	Baik
2,50% - 3,98%	Cukup Baik
1,50% - 2,49%	Kurang Baik
<1,50%	Buruk

Sumber: Lukviarman (2016:55)

Menurut Kieso *et al.* (2018), “*net income is the net results of the company’s performance over a period of a time. Net income represents the income after all revenues and expenses for the period are considered*” yang dapat diartikan bahwa “*net income* merupakan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu, laba bersih juga merupakan pendapatan setelah semua pendapatan dan beban untuk periode tersebut”. “Ketika pendapatan melebihi pengeluaran, hasilnya adalah laba” (Weygandt *et al.*, 2019). Kieso *et al.*, (2018) juga menambahkan “pendapatan atau *revenue* timbul dari kegiatan biasa perusahaan dan memiliki beberapa bentuk seperti, penjualan, bunga, dividen, dan sewa. Beban atau *expense* muncul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan memiliki beberapa bentuk seperti harga pokok penjualan, penyusutan, sewa, gaji dan upah, dan juga pajak”. “Untuk menghasilkan *net income*, terdapat format laporan laba rugi yaitu (Kieso *et al.*, 2018):

- 1) “*Sales or Revenue*”  
“Perhitungan penjualan atau pendapatan atas penjualan yang terdiri dari penjualan, diskon atas penjualan, retur penjualan”.
- 2) “*Cost of Goods Sold*”  
“Harga pokok penjualan merupakan harga pokok barang jadi dalam persediaan untuk menghasilkan suatu penjualan”.
- 3) “*Gross Profit*”  
“Laba kotor merupakan hasil dari pengurangan antara penjualan dengan harga pokok penjualan”.

- 4) *“Selling Expenses”*  
“Informasi mengenai pengeluaran perusahaan dalam kegiatan penjualan”.
- 5) *“Administrative or General Expenses”*  
“Informasi mengenai pengeluaran perusahaan dalam kegiatan administrasi perusahaan”.
- 6) *“Other income and expense”*  
“Mencakup sebagian besar transaksi lain yang tidak sesuai dengan kategori pendapatan dan beban yang telah disebutkan sebelumnya. *Item* tersebut dapat berupa keuntungan dan kerugian dari penjualan aset jangka panjang dan penurunan nilai aset. Pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen dan pendapatan bunga juga dilaporkan”.
- 7) *“Income from Operations”*  
*Income from operations* merupakan penghasilan perusahaan yang didapatkan dari operasi normal”.
- 8) *“Financing Costs”*  
“Informasi mengenai pengeluaran perusahaan dalam kegiatan pembiayaan seperti beban bunga”.
- 9) *“Income Before Income Tax”*  
“Merupakan penghasilan sebelum pajak penghasilan yaitu total pendapatan sebelum pajak penghasilan”.
- 10) *“Income Tax”*  
“Pajak penghasilan, bagian dari pelaporan pajak yang dikenakan atas penghasilan sebelum pajak penghasilan”.
- 11) *“Income from Continuing Operations”*  
“Merupakan hasil perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan, jika tidak memilikinya maka bagian ini tidak dilaporkan dan jumlahnya akan dilaporkan sebagai laba bersih”.
- 12) *“Discontinued Operations”*  
“Merupakan keuntungan atau kerugian dari operasional perusahaan yang dihentikan”.

13) “*Net Income*”

“Menyajikan alokasi laba bersih kepada pengendali pemegang saham dan kepentingan non-pengendali (disebut juga sebagai *minority interest*)”

14) “*Non-Controlling Interest*”

“Menampilkan alokasi dari laba bersih perusahaan untuk pemegang saham pengendali serta untuk kepentingan non pengendali yang muncul jika terdapat konsolidasi perusahaan”.

15) “*Earning per Share*”

“Merupakan laba per lembar saham yang dilaporkan”.

*Net income* atau pendapatan bersih yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laba tahun berjalan perusahaan.” Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2021) dalam PSAK 1, “laba tahun berjalan didapatkan dengan cara pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan kemudian akan menghasilkan laba bruto. Setelah itu, laba bruto ditambah dengan penghasilan lain dan bagian laba entitas asosiasi dan dikurangi dengan biaya distribusi, beban administrasi, beban lain-lain, biaya pendanaan yang akan menghasilkan laba sebelum pajak. Selanjutnya laba sebelum pajak akan dikurangi beban pajak penghasilan yang akan menghasilkan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan kemudian dikurangi kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan yang akan menghasilkan laba tahun berjalan”.

Weygandt *et al.*, (2019), menyatakan bahwa “*assets are resources a business owns*” yang berarti aset adalah sumber daya yang dimiliki bisnis. Weygandt *et al.*, (2019) juga menjelaskan bahwa “bisnis menggunakan asetnya dalam melakukan segala aktivitas seperti produksi dan penjualan. Karakteristik umum yang dimiliki oleh seluruh aset adalah kapasitas untuk menyediakan layanan atau manfaat di masa depan. Dalam sebuah bisnis, potensi layanan atau manfaat ekonomi masa depan itu pada akhirnya menghasilkan arus kas masuk (penerimaan)”. Sedangkan menurut Keiso *et al.*, (2018), “*assets are resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity*” yang dapat diartikan bahwa “aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh

entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “aset terbagi menjadi dua kategori yaitu aset lancar (*current asset*) dan aset tidak lancar (*non-current assets*). Aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan dapat diubah oleh perusahaan menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi baik dalam satu tahun atau siklus operasi atau dalam siklus operasi yang lebih lama”. “Aset lancar (*current asset*) terdiri dari 5 (lima) *item* utama yaitu (Kieso *et al.*, 2018):

1) “*Inventories*”

“Untuk menyajikan persediaan dengan tepat, perusahaan mengungkapkan dasar penilaian dan asumsi arus biaya yang digunakan”.

2) “*Prepaid Expenses*”

“Perusahaan memasukkan biaya dibayar di muka dalam aset lancar jika akan menerima manfaat (biasanya layanan) dalam satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama”.

3) “*Receivables*”

“Perusahaan harus secara jelas mengidentifikasi kerugian yang diantisipasi karena tidak tertagihnya jumlah dan sifat dari setiap piutang non-usaha, dan setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan. Kategori utama piutang harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait”.

4) “*Short-term Investments*”

“Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan harus melaporkan sekuritas perdagangan (baik utang atau ekuitas) sebagai aktiva lancar.

5) “*Cash and Cash Equivalents*”

“Uang tunai umumnya dianggap terdiri dari mata uang dan giro (uang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan). Setara kas bersifat jangka pendek, investasi yang sangat likuid yang akan jatuh tempo”.

Sedangkan, aset tidak lancar (*non-current assets*) terbagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu (Kieso *et al.*, 2018):

1) “*Long-term Investments*”

“Investasi jangka panjang dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu: investasi pada sekuritas seperti obligasi, saham, atau *long-term notes*, investasi pada aset berwujud yang tidak sedang digunakan pada operasi perusahaan seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi, investasi pada *special funds* seperti *sinking funds*, *pension funds*, atau *plant expansion fund*, investasi pada *non-consolidated subsidiaries* atau *associated companies*”.

2) “*Property, Plant and Equipment*”

“Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset berwujud jangka panjang yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Aset ini terdiri dari *physical property* seperti tanah, bangunan, mesin, *furniture*, alat, dan *wasting resources (minerals)*. Terkecuali tanah, perusahaan mendepresiasi aset-aset tersebut”.

3) “*Intangible Assets*”

“Aset tidak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki wujud fisik dan bukan sebuah instrumen keuangan. *Intangible assets* dapat merupakan *patent*, *copyrights*, *franchises*, *goodwill*, *trademarks*, *trade names*, dan *customer lists*.

4) “*Other Asset*”

“Aset lainnya pada praktiknya memiliki banyak macam seperti contoh yaitu *long-term prepaid expenses* dan *non-current receivables*. Aset lain yang termasuk dalam kelompok ini adalah aset dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual dan *restricted cash*. Total aset yang terdapat di dalam laporan posisi keuangan merupakan jumlah keseluruhan aset lancar dan aset tidak lancar”.

## **2.7 Pengaruh Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

“Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki sistem dan cara kerja yang baik dalam menghasilkan profit” (Kasin dan Arfianti, 2018). Basuony (2016) dalam Diliasmara & Nadirsyah (2019) menyatakan bahwa

“profitabilitas perusahaan dapat dianggap sebagai indikator manajemen yang baik sehingga perusahaan yang mengalami keuntungan dapat meyakinkan auditornya untuk menerbitkan laporan mereka dalam waktu yang lebih singkat agar dapat menyampaikan kabar baik kepada pemegang saham mengenai keuntungan yang dibuat”. “Semakin besar rasio profitabilitas maka semakin baik pula kinerja perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak lain yang berkepentingan” (Dewi *et al.*, 2021). “Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Apabila semakin tinggi laba perusahaan yang dilaporkan, akan memberikan kabar baik bagi pihak luar mengenai keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usaha, sehingga mendorong manajemen untuk menyampaikan laporan secara tepat waktu agar dapat dipergunakan informasinya oleh pihak luar untuk mengambil keputusan” (Asriyatun & Syarifudin, 2020).

“Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini adalah kabar baik bagi perusahaan sehingga perusahaan cenderung segera melakukan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Tetapi jika tingkat profitabilitasnya rendah, ini akan menjadi kabar buruk karena itu perusahaan cenderung memilih untuk menunda penyampaian laporan keuangan” (Septiani & Arfianti, 2022). Menurut Dewi *et al.* (2021), “rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan efisiensi perusahaan. laporan keuangan dengan profitabilitas yang tinggi merupakan gambaran dari adanya berita baik yang terkandung dalam laporan keuangan”. “Profitabilitas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan menunjukkan keberhasilan dari perusahaan tersebut dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan memberikan sinyal baik kepada publik, dengan cenderung segera menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, sehingga publik akan melihat bahwa manajemen berhasil dalam mengelola perusahaan tersebut dan laporan keuangan dalam keadaan yang sehat” (Kasin, Rizka Indri Arfianti, 2018).

“Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka menggambarkan bahwa semakin baik juga kinerja perusahaan, sehingga perusahaan seharusnya tidak ada lagi alasan untuk menunda penyampaian laporan keuangan” (Septiani & Arfianti, 2022). “Ketika suatu perusahaan memiliki nilai profitabilitas yang terus meningkat, maka hal ini direspon oleh investor sebagai bentuk peningkatan atau kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kinerja. Sehingga investor akan lebih mudah memilih perusahaan tersebut sebagai tempat investasi” (Valentina & Gayatri 2018). “Profitabilitas merupakan suatu berita penting yang bisa digunakan investor sebagai estimasi dalam rangka melakukan penanaman modal, serta dapat menjadi suatu indikasi kesuksesan kegiatan operasional perusahaan karena profitabilitas merepresentasikan efektivitas yang telah diperoleh perusahaan (Nurmiati, 2016 dalam Carolina & Tobing, 2019).

Menurut Novandalina *et al.* (2022), “*high profitability indicates that the company has a high ability to earn profits. Companies with good performance tend to provide information to other interested parties and submit their financial reports on time*”. Sehingga dapat diartikan bahwa “profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi untuk memperoleh laba. Perusahaan dengan kinerja yang baik cenderung memberikan informasi kepada pihak lain yang berkepentingan sehingga dapat menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu”. Oleh karena itu, ketika suatu perusahaan memiliki *ROA* yang tinggi, maka perusahaan efektif dan efisien dalam menghasilkan laba karena adanya standar dan aturan yang berlaku dalam perusahaan. Dengan adanya standar dan aturan yang berlaku dan jika diiringi dengan pengendalian internal yang baik, maka perusahaan dapat memberikan laporan keuangan serta data audit yang dibutuhkan oleh auditor sehingga auditor dapat lebih cepat dalam melakukan proses audit dan laporan keuangan dapat disampaikan ke publik dengan tepat waktu.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Diliasmara dan Nadirsyah (2019), Fortuna & Khristiana (2021), serta Azhari & Nuryatno (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan *ROA* berpengaruh

positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin tinggi kecenderungan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis pertama dapat dinyatakan sebagai berikut:

**Ha: Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.**

## **2.8 Likuiditas (*Current Ratio*)**

*“Liquidity describes the amount of time that is expected to elapse until an asset is realized or otherwise converted into cash or until a liability has to be paid”* (Kieso *et al.*, 2018). Diartikan bahwa “likuiditas menggambarkan jumlah waktu yang diharapkan untuk berlalu sampai aset direalisasikan atau diubah menjadi uang tunai atau sampai kewajiban harus dibayar”. *“Liquidity ratios measure the short-term ability of the company to pay its maturing obligations and to meet unexpected needs for cash”* (Weygandt *et al.*, 2019). Sehingga, “rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan kas yang tidak terduga”. Subramanyam (2014) dalam Fortuna & Khristiana (2021) mengatakan bahwa “likuiditas merupakan sebuah ukuran atas kemampuan perusahaan untuk memperoleh kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya dan terikat pada arus kas perusahaan beserta aset dan kewajiban lancar dalam komponennya”. “Likuiditas perusahaan dapat ditunjukkan oleh besar kecilnya aset lancar yaitu aset yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan” (Diliasmara & Nadirsyah, 2019). Menurut Dewi *et al.* (2021), “rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya”.

*“Short-term creditors such as bankers and suppliers are particularly interested in assessing liquidity. The ratios we can use to determine the company’s short-term debt-paying ability are the current ratio, the acid-test ratio, account receivable*



*turnover, and inventory turnover*” (Weygandt *et al.*, 2019). Diartikan bahwa “kreditor jangka pendek seperti bank dan pemasok sangat tertarik untuk menilai likuiditas. Rasio yang bisa digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya adalah rasio lancar, *acid* rasio, perputaran piutang, dan perputaran persediaan”. Menurut Kieso *et al.* (2018), “rasio likuiditas dapat dihitung dengan 3 (tiga) rasio yaitu *current ratio*, *quick or acid test ratio*, dan *current cash debt coverage*”. Pada penelitian ini, likuiditas diproksikan dengan *current ratio* (rasio lancar). “*Current ratio (CR)* merupakan pengukuran untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang jangka pendek” (Kieso *et al.*, 2018). Menurut Zutter & Smart (2019), “rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset jangka pendeknya serta merupakan salah satu ukuran terbaik dari kesehatan keuangan suatu perusahaan”. *Current ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut (Kieso, *et al.*, 2019):

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}}$$

(2.3)

Keterangan:

*Current asset* : aset lancar

*Current liabilities* : liabilitas/utang lancar

“*Working capital consists of the portion of the firm’s assets used in day-to-day transactions*” (Zutter & Smart, 2019). Diartikan bahwa “*working capital* terdiri dari porsi aset perusahaan yang digunakan dalam transaksi sehari-hari”. Menurut Ross *et al.*, (2019),

“*the term working capital refers to a firm’s short-term assets, such as inventory, and its short-term liabilities, such as money owed to suppliers. Managing the firm’s working capital is a day-to-day activity that ensures that the firm has sufficient resources to continue its operations and avoid costly interruptions. This involves a number of activities related to the firm’s receipt and disbursement of cash*”.

Sehingga, “istilah *working capital* mengacu pada aset jangka pendek perusahaan, seperti persediaan, dan kewajiban jangka pendek, uang yang harus dibayar kepada pemasok. Mengelola *working capital* perusahaan adalah kegiatan sehari-hari untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan kegiatan operasinya dan mencegah terjadinya kemungkinan kerugian. Ini melibatkan sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan”. Zutter & Smart (2019) menambahkan, “*net working capital is the difference between the firm’s current assets and its current liabilities*. Sehingga, “*net working capital* adalah selisih antara aset lancar dan liabilitas lancar perusahaan”. Menurut Ross *et al.* (2019), “*working capital* dapat dirumuskan sebagai berikut”:

$$\text{Working Capital} = \text{Current Asset} - \text{Current Liabilities}$$

(2.4)

Keterangan:

*Working capital* : modal kerja

*Current asset* : aset lancar

*Current liabilities* : liabilitas/utang lancar

Menurut IAI (2021), “aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut diharapkan diterima oleh entitas”. Menurut Weygandt *et al.*, (2019), “*current assets are assets that a company expects to convert to cash or use up within one year or its operating cycle, whichever is longer*”. Diartikan bahwa “aset lancar merupakan aset yang diharapkan oleh perusahaan untuk dikonversi menjadi uang tunai atau digunakan dalam satu tahun atau siklus operasinya yang lebih lama”. Sedangkan, menurut Kieso *et al.*, (2018) “aset lancar adalah uang tunai atau aset lain yang diharapkan dapat dikonversi oleh perusahaan menjadi kas, dijual, atau digunakan dalam kegiatan operasi dalam satu siklus operasi atau dalam satu tahun”. “Untuk sebagian besar aktivitas bisnis, batas waktu untuk klasifikasi

sebagai aset lancar adalah satu tahun. Misalnya, seperti piutang yang merupakan aset lancar karena perusahaan akan menagihnya dan mengubahnya menjadi kas dalam waktu satu tahun. Persediaan juga merupakan aset lancar karena perusahaan mengharapkan untuk menggunakan persediaan dalam operasi dalam satu tahun” (Weygandt *et al.*, 2019).

“*Interest receivable, inventory, prepaid insurance, and prepaid rent are included as current assets because they will be converted into cash or used by the business within a relatively short period of time.*” (Kieso *et al.*, 2018). Sehingga, “piutang bunga, persediaan, asuransi dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka termasuk sebagai aset lancar karena akan dikonversi menjadi uang tunai atau digunakan oleh bisnis dalam waktu yang relatif singkat”. Menurut IAI (2021) “entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika”:

- 1) “entitas mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal”.
- 2) “entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan”.
- 3) “entitas mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan”.
- 4) “aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas) kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan”.

Menurut Weygandt *et al.*, (2019) “*current liability* atau kewajiban lancar adalah utang yang diharapkan perusahaan untuk dibayar dalam satu tahun atau siklus operasi”. Weygandt *et al.*, (2019) menambahkan, “*financial statement users want to know whether a company’s obligations are current or non-current. A company that has more current liabilities than current assets often lacks liquidity, or short-term debt-paying ability*” yang dapat diartikan bahwa “pengguna laporan keuangan ingin mengetahui apakah kewajiban perusahaan bersifat kewajiban lancar atau tidak lancar. Perusahaan yang memiliki lebih banyak kewajiban lancar daripada aset lancarnya sering kali kurang dalam hal

likuiditas atau kemampuan dalam membayar utang jangka pendeknya”. Menurut Kieso *et al.*, (2018), “terdapat beberapa jenis kewajiban lancar yaitu:

1) “*Accounts Payable*”

“Utang usaha adalah saldo yang terutang kepada orang lain untuk suatu barang, perlengkapan, atau layanan”.

2) “*Notes Payable*”

“Wesel bayar merupakan suatu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel bayar ini timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya”.

3) “*Current Maturities of Long-term Debt*”

“*Current maturities of long-term debt* dilaporkan sebagai kewajiban lancar bagian dari obligasi, hipotek, wesel, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam anggaran berikutnya. Ini mengkategorikan jumlahnya sebagai hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini”.

4) “*Short-term Obligations Expected to be Refinanced*”

“Kewajiban jangka pendek disini adalah utang yang dijadwalkan untuk jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan perusahaan”.

5) “*Dividend Payable*”

“Hutang dividen tunai adalah jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya”.

6) “*Customer Advances and Deposits*”

“Setoran tunai ini merupakan setoran yang dapat dikembalikan kembali yang diterima dari pelanggan. Perusahaan dapat menerima simpanan dari pelanggan untuk menjamin kinerja kontrak atau layanan sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan”.

7) “*Unearned Revenues*”

“Pendapatan diterima dimuka timbul ketika perusahaan menerima uang muka”.

8) *“Sales and Value-added Taxes Payable”*

“Sebagian besar negara memiliki pajak konsumsi berupa pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai (PPN)”.

9) *“Income Taxes Payable”*

“Sebagian besar pajak penghasilan bervariasi secara proporsional dengan jumlah pendapatan tahunan”.

10) *“Employee-related Liabilities”*

“Perusahaan juga melaporkan sebagai jumlah kewajiban lancar yang terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah di akhir suatu periode akuntansi”

Menurut IAI (2021) dalam PSAK 1, “entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek, jika”:

- 1) “entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya”
- 2) “entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan”.
- 3) “liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan”.
- 4) “entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan”.

## **2.9 Pengaruh Likuiditas terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

“Likuiditas merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pemenuhan kewajiban jangka pendek yang baik dilakukan oleh perusahaan, artinya perusahaan dalam kondisi yang stabil atau baik, dan menjadi berita yang baik atau sinyal positif bagi pemegang saham” (Dewayani *et al.*, 2017 dalam Fortuna & Khristiana, 2021). “Tingkat likuiditas yang tinggi pada sebuah perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik, sedangkan tingkat likuiditas yang rendah

menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik” (Diliasmara & Nadirsyah, 2019). Menurut Nurmiati (2016) dalam Asriyatun & Syarifudin (2020), “perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, sehingga perusahaan dengan kondisi seperti ini akan cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya”.

“Likuiditas memperlihatkan tingkat ketersediaan modal kerja yang dibutuhkan dalam aktivitas operasional perusahaan. Tidak sedikit dijumpai perusahaan yang kerap kali mengalami kesulitan finansial sehingga tidak mampu mendanai kegiatan operasionalnya maupun dalam melakukan pembayaran utang sehingga nantinya perusahaan akan memiliki laporan keuangan yang mengandung berita buruk atas ketidakmampuan perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajibannya. Keadaan ini pun akan membuat pihak perusahaan menunda pelaporan keuangannya kepada publik karena akan memengaruhi kepercayaan investor maupun kreditur” (Veronika *et al.*, 2019). “Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, dan hal ini akan menjadi berita baik bagi calon investor. Dengan adanya berita baik tersebut, perusahaan akan memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan berbagai dukungan dari banyak pihak, mulai dari lembaga keuangan, kreditur, maupun pemasok. Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, maka semakin tinggi juga kinerja perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya” (Supartini *et al.*, 2021).

“Apabila perbandingan aset lancar dengan hutang lancar semakin besar, artinya semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kabar baik bagi perusahaan yang nantinya akan memengaruhi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu karena akan membuat reaksi pasar menjadi positif terhadap perusahaan” (Diliasmara &

Nadirsyah, 2019). “Semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya mengasumsikan bahwa perusahaan dalam kondisi yang stabil atau baik. Semakin likuid suatu perusahaan maka semakin tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Perusahaan memiliki dorongan untuk segera melaporkan laporan keuangannya kepada publik, dimana informasi yang tersedia akan memberikan masukan kepada publik dalam proses pengambilan keputusan ekonomi” (Asriyatun & Syarifudin, 2020).

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa jika perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar perusahaan semakin besar, maka menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dengan kemampuan perusahaan membayar utang lancar yang tinggi, maka risiko gagal bayar rendah. Dengan risiko gagal bayar yang rendah dan jika disertai dengan pengendalian internal yang baik, maka risiko salah saji akan semakin kecil sehingga auditor dapat menyelesaikan proses audit dengan cepat dan perusahaan bisa menyampaikan laporan keuangan kepada BEI dengan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Surachyati *et al.* (2019), Dewi *et al.* (2021), Nasihin & Purwandari (2022) menunjukkan bahwa likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis kedua dapat dinyatakan sebagai berikut:

**Ha<sub>2</sub>: Likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.**

### **2.10 Leverage (Debt to Equity Ratio)**

“Sumber dana perusahaan dapat diperoleh dari dalam maupun dari luar perusahaan. Pemilihan sumber pendanaan perusahaan tergantung dari tujuan, syarat-syarat, keuntungan, dan kemampuan perusahaan. Umumnya, sumber pendanaan perusahaan dapat diperoleh dari modal sendiri dan pinjaman. Perusahaan dapat memilih dana dari salah satu sumber tersebut ataupun kombinasi dari keduanya” (Kasmir, 2021). Menurut Zutter & Smart (2019),

*“leverage ratios (also called solvency ratios) look at the mix of debt and equity financing the firm uses to fund its activities. How much the firm borrows and whether it can repay its debts are major concerns to potential investors”.*

Diartikan bahwa “rasio *leverage* (rasio solvabilitas) melihat campuran pembiayaan utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk mendanai aktivitasnya. Berapa banyak yang dipinjam perusahaan dan apakah perusahaan tersebut dapat membayar kembali utangnya merupakan perhatian utama bagi calon investor”. “Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kreditur dan pemegang saham jangka panjang sangat tertarik pada kemampuan perusahaan dalam membayar bunga yang jatuh tempo dan untuk membayar kembali nilai nominal utang pada saat jatuh tempo” (Weygandt *et al.*, 2019).

“Terdapat 3 rasio *leverage* yang banyak digunakan, yaitu *debt to equity ratio*, *equity multiplier* and *time interest earned*”. (Zutter dan Smart, 2019). Pada penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur *leverage* adalah *debt to equity ratio (DER)*. Menurut Zutter dan Smart (2019), *debt to equity ratio* mengukur jumlah relatif dana yang disediakan berasal dari pemberi pinjaman atau pemilik perusahaan”. Nilai dari *debt to equity ratio (DER)* dapat dicari dengan rumus sebagai berikut (Ross *et al.*, 2019):

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

(2.5)

Keterangan:

*Total liabilities* : Total utang yang dimiliki perusahaan

*Total equity* : Total ekuitas yang dimiliki perusahaan

Menurut IAI (2021) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, “liabilitas adalah kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat



ekonomik”. “*The liabilities are debts owed to various creditors that have lent money to the firm. A firm’s creditors may include suppliers, banks, or bondholders*” (Zutter & Smart, 2019). Dinyatakan bahwa “liabilitas adalah utang kepada berbagai kreditur yang telah memberikan pinjaman uang kepada perusahaan. Kreditur perusahaan dapat mencakup pemasok, bank atau pemegang obligasi”. Menurut Weygandt *et al.*, (2019), “liabilitas adalah klaim atas sebuah aset. Biasanya suatu bisnis meminjam uang dan membeli barang dagangan secara kredit”. “Agar liabilitas timbul, tiga kriteria harus dipenuhi” (IAI, 2021):

- 1) “entitas memiliki kewajiban”
- 2) “kewajiban tersebut adalah untuk mengalihkan sumber daya ekonomik”
- 3) “kewajiban tersebut adalah kewajiban kini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu”.

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “liabilitas diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu: kewajiban jangka pendek (*current liabilities*) dan kewajiban jangka panjang (*non-current liabilities*). Kewajiban jangka pendek (*current liabilities*) adalah kewajiban yang diharapkan perusahaan untuk dibayar dalam satu tahun atau siklus operasi”. “Berbagai jenis kewajiban lancar termasuk wesel bayar, utang usaha, pendapatan yang belum diperoleh, dan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun” (Kieso *et al.*, 2018). Sedangkan, kewajiban jangka panjang (*non-current liabilities*) adalah kewajiban yang perusahaan harapkan untuk dibayar lebih dari satu tahun di masa depan. Kewajiban ini sering dalam bentuk obligasi atau wesel jangka panjang (Weygandt *et al.*, 2019).

Menurut Kieso *et al.*, (2018), “terdapat 3 (tiga) konsep kewajiban jangka pendek (*current liabilities*), yaitu”:

- 1) “Utang yang dihasilkan dari perolehan barang dan jasa seperti akun utang usaha, utang gaji dan upah, utang pajak penghasilan, dan sebagainya”.
- 2) “Penerimaan yang diterima di muka untuk pengiriman barang atau pelaksanaan layanan, seperti pendapatan sewa yang belum merupakan

pendapatan atau pendapatan langganan yang belum merupakan pendapatan”.

- 3) “Kewajiban lain yang likuidasinya akan terjadi dalam siklus operasi atau satu tahun, seperti porsi obligasi jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan, kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan, atau estimasi kewajiban, seperti sebagai kewajiban garansi. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, estimasi kewajiban sering disebut sebagai ketentuan”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “secara umum terdapat 3 (tiga) tipe kewajiban jangka panjang (*non-current liabilities*) sebagai berikut”:

- 1) “Kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu, seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan wesel bayar jangka panjang”.
- 2) “Kewajiban yang timbul dari operasi normal perusahaan, seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan”.
- 3) “Kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar, atau penerima pembayaran, atau tanggal pembayaran, seperti jaminan layanan atau produk, kewajiban lingkungan, dan restrukturisasi, sering disebut sebagai ketentuan”.

Menurut IAI (2021), “ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas”. Menurut Kieso *et al.*, (2018), “*equity is the residual interest in the assets of the company after deducting all liabilities*”. Sehingga, “ekuitas adalah kepentingan residual dalam aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban”. Sedangkan, menurut Weygandt *et al.*, (2019), “*the ownership claim on a company’s total assets is equity. It is equal to total assets minus total liabilities*” yang dapat diartikan bahwa “klaim kepemilikan atas total aset perusahaan disebut dengan ekuitas. Sama seperti total aset dikurangi dengan total kewajiban perusahaan”. Menurut Kieso *et al.* (2018), “ekuitas diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kategori berikut dalam laporan posisi keuangan, yaitu”:

- 1) “*Share Capital*: yaitu nilai nominal atau nilai saham yang diterbitkan. Ini termasuk *ordinary shares* (saham biasa) dan *preference shares* (saham preferen)”.
- 2) “*Share Premium*: yaitu kelebihan jumlah yang dibayarkan melebihi nilai nominal atau nilai yang sudah ditetapkan”.
- 3) “*Retained Earnings*: yaitu laba bersih yang ditahan oleh perusahaan”.
- 4) “*Accumulated Other Comprehensive Income*: yaitu jumlah keseluruhan dari *other comprehensive income*”.
- 5) “*Treasury Shares*: yaitu jumlah saham biasa yang dibeli kembali”.
- 6) “*Non-Controlling Interest (Minority Interest)*: yaitu sebagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan”.

### **2.11 Pengaruh *Leverage* terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

“Rasio *leverage* mewakili risiko keuangan perusahaan” (Mustika & Ferdila, 2021). Menurut Handayani *et al.* (2021), “perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi berarti ketergantungan dengan pinjaman atau hutang untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehingga hal tersebut merupakan kabar yang buruk dan akan memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan perusahaan yang mempunyai *leverage* yang rendah lebih banyak membiayai investasinya dengan modal sendiri. Semakin tinggi *leverage* berarti semakin tinggi risiko karena ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban hutangnya baik pokok maupun bunganya”. “Bagi pemberi pinjaman (kreditur), informasi atas rasio ini sangat penting karena pengukuran tinggi risiko utang yang ditujukan pada suatu perusahaan akan sangat menentukan pengambilan keputusan pada *stakeholders*” (Fortuna & Khristiana, 2021).

Menurut Diliasmara & Nadirsyah (2019), “perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi dianggap berisiko jauh lebih tinggi oleh pemberi pinjaman. Risiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan perusahaan merupakan berita buruk yang akan

memengaruhi kondisi perusahaan di pandangan publik”. Veronika *et al.* (2019) menyatakan bahwa “semakin tinggi *leverage* perusahaan berarti semakin besar hutang perusahaan pada pihak luar. Tingginya utang mencerminkan tingginya risiko keuangan perusahaan yang menandakan laporan keuangan mengandung berita buruk yang akan memengaruhi kondisi perusahaan dari pandangan para investor”. “Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka resiko keuangan yang dimiliki perusahaan juga semakin tinggi. Hubungan antara resiko keuangan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah apabila resiko keuangan suatu perusahaan tinggi maka ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan tersebut cenderung menurun” (Handayani *et al.*, 2021).

“Perusahaan yang memiliki *leverage* rendah adalah perusahaan yang mampu membayar kewajiban perusahaan pada suatu periode. Apabila perusahaan memiliki kemampuan membayar utang tinggi, dapat diasumsikan perusahaan tersebut memiliki keuangan yang sehat karena aktiva yang dimiliki perusahaan lebih besar dibandingkan dengan kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan tersebut” (Kasin & Arfianti, 2018). “Semakin rendahnya rasio *leverage* suatu perusahaan maka perusahaan akan lebih mudah mendapatkan pendanaan dari investor” (Prameswari dan Yustrianthe, 2015 dalam Tang & Elvi, 2021)

“Saat perusahaan mempunyai jumlah proporsi utang yang lebih banyak dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka auditor membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan karena adanya prosedur audit akun utang yang rumit dan penemuan untuk bukti-bukti audit yang kompleks atas pihak-pihak kreditur perusahaan” (Meidina & Tartilla, 2022). “Pada umumnya suatu entitas akan mengurangi rasio *leverage* untuk mengurangi risiko, sehingga waktu pelaporan keuangan akan terlambat dan memerlukan waktu yang lebih lama dalam pekerjaan audit. Hal ini mengakibatkan lamanya auditor dalam mengaudit laporan keuangan suatu entitas” (Al-Faruqi, 2020). “Ketika utang perusahaan lebih besar daripada aktiva yang dimiliki, hal tersebut akan mengakibatkan kerugian dan meningkatkan kehati-hatian auditor terhadap laporan keuangan yang diaudit. Dengan adanya kehati-hatian auditor maka mengakibatkan

keterlambatan dalam penyampaian serta publikasi laporan keuangan kepada publik” (Prastiwi *et al.*, 2019).

Maka dapat disimpulkan bahwa semakin kecilnya saldo utang perusahaan, menunjukkan bahwa semakin rendahnya risiko gagal bayar perusahaan. Dengan semakin rendahnya risiko gagal bayar, menunjukkan bahwa perusahaan dapat mencegah risiko keuangan yang dapat terjadi dan menyebabkan risiko salah saji semakin kecil karena populasi akun utang akan semakin kecil. Semakin kecilnya populasi akun utang maka akan mempersingkat waktu auditor dalam melakukan audit sehingga perusahaan dapat menyampaikan laporan keuangan kepada publik dengan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani *et al.* (2021), Janrosi & Prima (2018) menyatakan bahwa *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio (DER)* berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis ketiga dapat dinyatakan sebagai berikut:

**Ha3: *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.**

## **2.12 Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Leverage* Secara Simultan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

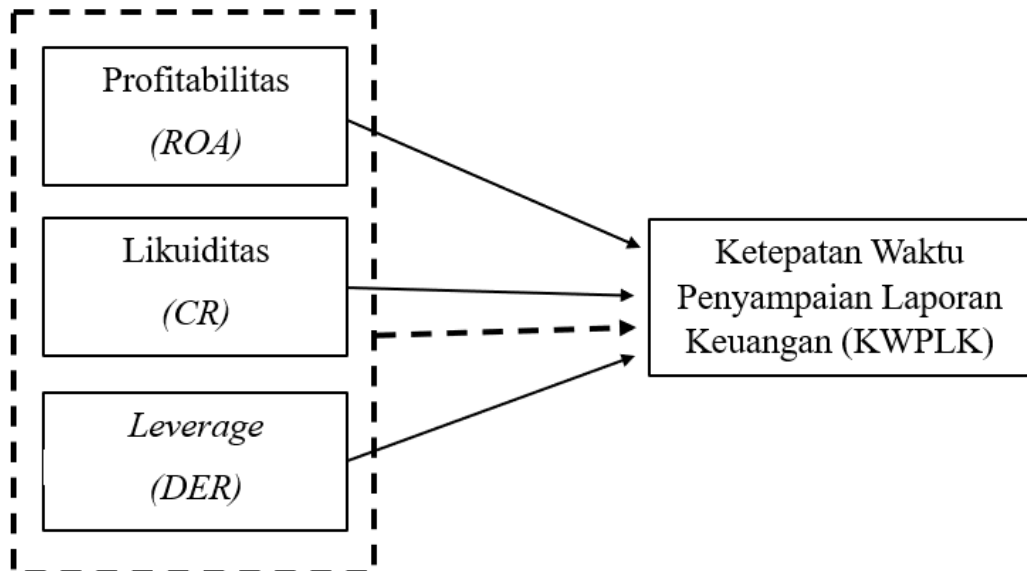
Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Diliasmara & Nadirsyah (2019) menunjukkan bahwa “profitabilitas, likuiditas, *financial leverage*, dan struktur kepemilikan berpengaruh secara bersama-sama terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan”. Dari hasil penelitian Janrosi & Prima (2018), “*leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan struktur kepemilikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prayer & Simbolon (2022) menyatakan bahwa “variabel rasio likuiditas dan reputasi KAP berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan”. Penelitian yang dilakukan oleh Nasihin & Purwandari (2022) menyatakan bahwa “*the simultaneous test of the variables of profitability, liquidity and, firm size*

*simultaneously have a significant influence on the timeliness of the delivery of financial reports” yang artinya variabel profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.*

### 2.13 Model Penelitian

**Gambar 2.1 Model Penelitian**



U M N  
U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A